

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**

**RYAN VIRMAN**

**2017/17060136**

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP  
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA**

Nama : Ryan Virman  
BP/NIM : 2017/17060136  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan Pembangunan  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, S.E., M.E  
NIP.19830505 200604 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing



Yeniwati, S.E., M.E  
NIP. 19760222 200501 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH  
TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA**

Nama : Ryan Virman  
NIM/TM : 17060136/2017  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi perencanaan pembangunan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Yeniwati, SE, ME	1. 
2	Anggota	: Mike Triani, S.E, M.M	2. 
3	Anggota	: Dewi Zaini Putri, S.E, M.M	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ryan Virman  
Nim/Th. Masuk : 17060136/2017  
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 17 Maret 1999  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Perencanaan Pembangunan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Kalimas No 12 Padang Baru  
No.Hp/Telephone : 082387646647  
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali tertulis jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 09 Februari 2022

  
METERAI TEMPEL  
FA2DBASX907949798

**Ryan Virman**  
NIM 17060136

## ABSTRAK

**Ryan Virman (17060136) : Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. Skripsi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Ibu Yeniwati, S.E, M.E**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia dengan variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada penelitian ini ditetapkan sebagai kualitas sumber daya manusia dan variabel bebas yang terdiri dari pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial dan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan metode *Random Effect Model (REM)* dengan *cross section* 33 provinsi di Indonesia dan *Time Series* 2013-2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Kemudian pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “analisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan dan bantuan serta saran dari berbagai pihak yang diperoleh penulis dapat mempermudah dalam proses pembelajaran ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terutama kedua orang tua, adik serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis, serta doa, dukungan, semangat, dan motivasi yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Idris, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Melti Roza Adry, S.E, M.E selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Dewi Zaini Putri, S.E, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan selaku penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yeniwati, S.E, M.E selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen pembimbing yang telah memberikan banyak pelajaran, motivasi, kritik dan saran yang sangat berharga bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini di waktu yang diinginkan.
6. Ibu Mike Triani, S.E, M.M selaku penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.

8. Kak Lidya selaku Admin Jurusan yang telah banyak membantu urusan administrasi perkuliahan, kelulusan kompre dan wisuda serta hal-hal lain yang terkait skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Staff Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapat referensi.
10. Alm. Kakek yang Semasa hidupnya selalu mendengar keluh kesah saya dan terus memberikan nasehat yang berharga hingga kakek berpulang ke rahmatullah. Terimakasih banyak saya ucapkan.
11. Sahabat Sewaktu SMP hingga sekarang, Imam, Willy, Gabri yang telah banyak membantu memberikan saran dan semangat.
12. Teman-teman seperjuangan Keynes Avengers, yang tersupport dan perhatian Umi, Winda, Tika, Ririn, Jerry, Zakky, Halim, Abi, Pered, Judi, Ichsan, Fikri yang sering menjadi teman berjuang dalam berbagai perkuliahan, dan tempat bercanda dan cerita.
13. Sahabat-sahabat dalam Pejuang skripsi, Jaya, Yohadi, Andre, Fikri, Kevin, Bemo, Ferdi, Aldiyus, Aldi, Alda, Sintia, Yuni, (Alm) Ica. Semoga mereka selalu sehat dan senantiasa dalam rahmat Allah SWT.
14. Adik-adik terheboh, terjulid, dan perhatian Ami, Cindy, Putri, Zizah, Rahma, Ibum, Dhea, Bryan, Windo, Fahmi, Yop, De Okta, dan yang lainnya di Ilmu Ekonomi.

15. Teman–teman dekat yang selalu ada ketika dikampus dan dimanapun Jemi, Panca, Wiwid, Eja, Anggun, Dedek, Muthi, Amel, Willa, Riri Ambo, Shagira, Kak Yosi yang senantiasa mendengarkan keluh kesah perkuliahan.
16. Teman seperbimbingan Putra, Dinda, Aldi, Elsa, Efnia, Halim, Fahmi, Bang Abram, Bang Oot yang selalu support satu sama lain selama bimbingan.
17. Penyemangat Saya Kirana yang selalu Support dan membantu Skripsi saya hingga mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi.
18. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017 tanpa terkecuali dan senior-senior dan adek-adek junior Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah bersedia membantu dan serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
19. Seluruh kawan-kawan Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan sahabat-sahabat terdekat angkatan 2017 yang telah mendukung memberi semangat dan membantu penulis hingga selesainya skripsi ini.
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan

penulis khususnya. Aamiin Yaa Rabbal'alamin. Dengan tulus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua.

Padang, Februari 2022

Penulis

Ryan Virman

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Teori .....	15
1. Pembangunan Manusia.....	15
2. Pengeluaran Pemerintah .....	19
3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan.....	22
4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan .....	23
5. Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial.....	24
6. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur .....	25
B. Hubungan Antar Variabel .....	26
1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	26

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	27
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia .....	28
4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia.....	30
C. Penelitian Terdahulu .....	31
D. Kerangka Konseptual .....	35
E. Hipotesis.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis Data dan Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Defenisi Operasional Variabel .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	44
1. Analisis Deskriptif.....	44
2. Analisis Induktif .....	44
a. Model Regresi Data Panel .....	45
b. Uji pemilihan Model Panel.....	46
c. Uji Asumsi Klasik .....	49
d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	50
e. Uji Hipotesis.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	52
a. Kondisi Geografis.....	52
b. Jumlah Penduduk.....	53
2. Deskripsi Variabel Penelitian .....	55

a.	Deskripsi Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia .....	55
b.	Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan .....	58
c.	Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan.....	62
d.	Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial .....	64
e.	Deskripsi Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur .....	67
3.	Analisis Data .....	71
a.	Analisis Statistik Deskriptif.....	71
b.	Analisis Induktif .....	71
c.	Uji Pemilihan Model Data Panel .....	71
d.	Uji Regresi Data Panel .....	74
e.	Pengujian hipotesis.....	77
f.	Koefisien Determinasi .....	79
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	80
1.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia .....	80
2.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia .....	82
3.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.....	84
4.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia .....	87
	<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
A.	Kesimpulan .....	89
B.	Saran.....	90
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>95</b>

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1 Trend Pertumbuhan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia Tahun 2013 – 2020 (Persen) .....	4
Grafik 1. 2 Trend pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah per Sektor dan Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2013-2020 di Indonesia.....	7

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2013-2020 .....	54
Tabel 4. 2 Perkembangan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Indonesia Tahun 2013-2020 (Persen).....	57
Tabel 4. 3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Provinsi Indonesia Tahun 2013-2020 (Juta Rupiah) .....	60
Tabel 4. 4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Indonesia Tahun 2013-2020 (Juta Rupiah) .....	63
Tabel 4. 5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial .....	66
Tabel 4. 6 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur .....	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow.....	72
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman.....	72
Tabel 4. 9 Hasil Uji Langrange Multiplier.....	73
Tabel 4. 10 Hasil Estimasi Random Effect Model (REM) .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	37
---------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah sektor Bantuan Sosial dan Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur tahun 2013-2020.....	96
Lampiran 2 Hasil Uji Chow .....	100
Lampiran 3 Hasil Uji Hausman.....	100
Lampiran 4 Hasil Uji Langrange Multiplier .....	100
Lampiran 5 Hasil Estimasi Random Effect Model .....	101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan negara dan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara tersebut. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara negara sedang berkembang. ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang maupun jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang maupun jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Mirza, 2012).

Pembangunan kualitas sumber daya manusia sangat penting bagi pembangunan suatu negara, karena sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan ekonomi. Hal ini karena sumber daya manusia merupakan modal dasar kekayaan suatu negara, merupakan faktor produksi yang secara aktif mengumpulkan modal, mengembangkan sumber daya alam, membentuk organisasi sosial, ekonomi, dan politik serta mewujudkan pembangunan nasional. Tanpa sumber daya manusia, tidak mungkin mengelola sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya bergantung pada kuantitas sumber daya manusia, tetapi juga pada kualitas masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya tercipta dari segi nilai

komparatif, tetapi juga dapat dilihat dari nilai kompetitif, generatif, inovatif dengan menggunakan energi tertinggi, seperti pengetahuan keilmuan, kreativitas dan imajinasi, serta tidak hanya menggunakan energi mentah tersebut. sebagai bahan mentah, tanah, air, tenaga, otot dan sebagainya.

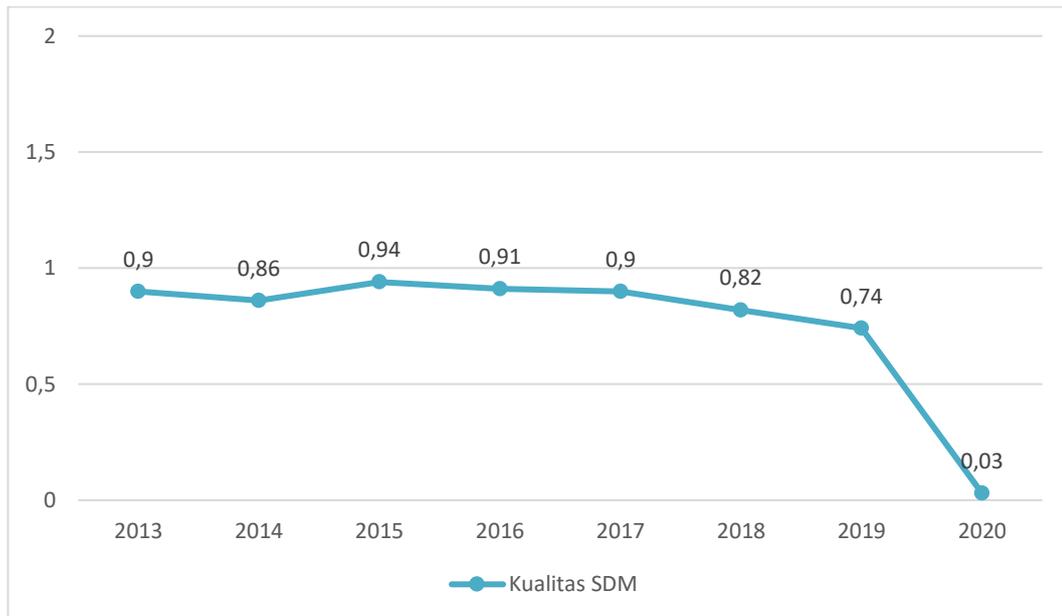
Suatu negara dikatakan maju dapat tercermin jika yang dijadikan acuan salah satunya adalah masalah kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dilihat dari keterkaitan aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan terhadap aspek lainnya, menunjukkan bahwa taraf baik dalam penanganan ketiga aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan menfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, Dapat memberikan dampak positif terhadap aspek lainnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai output target pemerintah karena percaya bahwa indeks tersebut adalah ukuran yang lebih baik daripada indikator ekonomi belaka, seperti pertumbuhan PDB (Prasetyo, 2013).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan total jumlah penduduk 252.200.000 jiwa menurut sumber (BPS). Dengan total penduduk sebanyak ini, Indonesia masih termasuk dalam golongan negara sedang berkembang. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan pembangunan kualitas SDM yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan.

UNDP menilai pemerintah saat ini masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kesenjangan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Penasihat Teknis Demokrasi Pemerintah dan Unit Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia mengatakan bahwa beberapa langkah untuk menutup kesenjangan telah diambil dalam rencana pemerintah saat ini, tetapi kesenjangan tersebut belum benar-benar menutup, yang berarti kesenjangan itu masih ada dan pembangunan tidak dapat dilakukan jika setengah dari populasi tidak Perbaikan dapat dicapai. Pengecualian perempuan, minoritas dan orang-orang di daerah terpencil menghambat kemajuan pembangunan manusia. Selain itu, kesenjangan teknologi yang berdampak pada pelayanan kesehatan yang kurang optimal menjadi permasalahan di Indonesia saat ini. Inilah yang menyebabkan kesenjangan dan ketertinggalan besar di dunia.

Publikasi yang dilakukan oleh UNDP dapat dilihat pada website [hdr.undp.org](http://hdr.undp.org), Mengatakan bahwa data Skor IPM Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2020 meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,69%, jadi secara absolut IPM Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, Peningkatan ini merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Indonesia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik.

Berikut grafik 1.1 yang menunjukkan Trend Pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Indonesia diukur melalui indikator IPM dalam delapan tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (data diolah)

**Grafik 1. 1**  
**Trend Pertumbuhan Kualitas Sumber Daya Manusia**  
**di Indonesia Tahun 2013 – 2020 (Persen)**

Dari Grafik 1.1 terlihat bahwa Kualitas SDM di Indonesia mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, Pada tahun 2014 Kualitas SDM di Indonesia turun sebesar 0,86% dan kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan Kualitas SDM di Indonesia kembali naik sebesar 0,94%. Namun dalam lima tahun terakhir laju pertumbuhan Kualitas SDM cenderung melambat yaitu Untuk tahun 2016 sampai 2019. Laju Kualitas SDM tersebut rata-rata peningkatan pertumbuhan sebesar 0,8% per tahun dan pada tahun 2020 laju pertumbuhan hanya sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya karena adanya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pengeluaran perkapita masyarakat di Indonesia. yaitu angka harapan hidup, rata rata lama sekolah dan Rendahnya peningkatan Laju pertumbuhan Kualitas SDM di Indonesia ini terjadi karena adanya ketidak pemerataan di setiap komponen pendapatan perkapita. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi yang

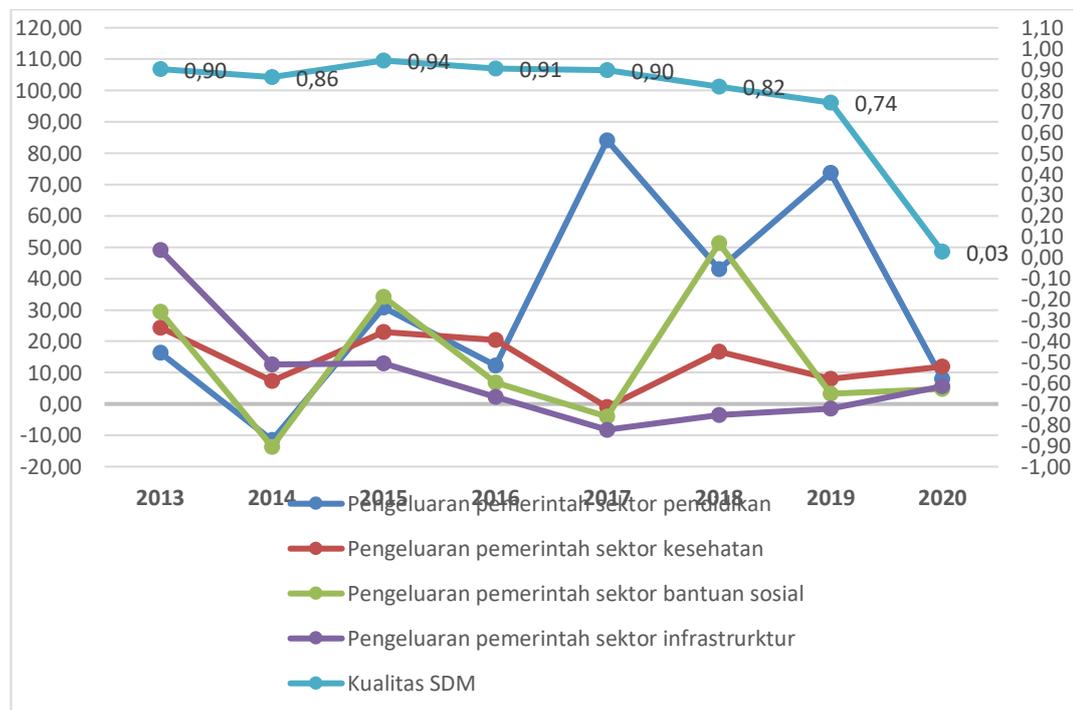
tidak merata dan sangat Jawa sentris oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menurut BPS dalam rilisnya (CNBC Indonesia, 2020).

UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan kualitas SDM tersebut. Pertama, tingkat kemiskinan dan kelaparan. Kedua, tingkat kesehatan dan kematian selanjutnya akses ke layanan dasar. Dengan adanya segala permasalahan tersebut maka Indonesia masih termasuk negara dengan kategori menengah untuk pembangunan manusia (medium human development).

Teori pengembangan modal manusia yang dikaitkan dengan Schultz dalam (Orji et al., 2017) memberikan kerangka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Prinsip dasar teori pengembangan modal manusia adalah bahwa investasi dalam modal manusia akan mengarah pada perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia dan pada gilirannya menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Ini menyiratkan bahwa investasi modal manusia menghasilkan pengembangan sumber daya manusia.

Peranan pembentukan modal manusia (Human capital) sering dikaitkan dengan investasi membangun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa besar keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, investasi dalam pengeluaran pemerintah tampaknya menjadi penting untuk lebih meningkatkan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi (Maharda & Aulia, 2020).

Berdasarkan uraian teori diatas maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas SDM dan perlu diperhatikan sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Indonesia yaitu diantaranya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, Bantuan Sosial dan Infrastruktur dimana pengeluaran pemerintah ialah salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pemerintah daerah tersebut (Rahmawati & Nur Intan, 2020). Guna mengetahui pertumbuhan anggaran pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial serta infrastruktur sepanjang periode 2013-2020 dapat dilihat pada Grafik 1. 2.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020 (Data Diolah)

**Grafik 1. 2**  
**Trend pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah per Sektor dan**  
**Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2013-2020 di Indonesia**

Dapat dilihat pada Grafik 1.2 Laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mengalami Fluktuasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan pengeluaran sektor pendidikan mengalami penurunan sebesar -11,56%. Lalu pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan sebesar 30,76%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 12,21% dan pada tahun 2017 pertumbuhan pengeluaran sektor pendidikan mengalami peningkatan yang tertinggi yaitu sebesar 84,14%. pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 43,01%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 73,69% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 8,01% dari tahun sebelumnya. Peningkatan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017, peningkatan terjadi karena Kualitas sumber daya yang baik dipupuk dengan pendidikan yang baik sesuai yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa pertumbuhan Indonesia sulit terpacu tinggi lantaran produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah. Rendahnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan SDM membuat biaya investasi untuk mendorong pertumbuhan semakin mahal. Maka pemerintah mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara Hal ini sejalan yang disampaikan wahid dalam (Muhammad Saleh, 2016).

Hal ini terjadi tergantung seberapa banyak kab/kota dan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di provinsi di Indonesia tersebut maka semakin banyak jumlah kab/kota atau semakin banyak anggaran pengeluaran yang dilakukan

pemerintah dan juga semakin pemerintah memperhatikan kondisi pendidikan di daerah tersebut.

Jika kita lihat pada Grafik 1.2 terlihat pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017, yang dimana pada tahun yang sama kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan. Dan seharusnya pada tahun tersebut kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan yang dikarenakan naiknya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Oleh karena itu pada kondisi tersebut melihatkan sebuah fenomena pada tahun 2017. Hal ini dapat diasumsikan bahwa seharusnya naiknya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tersebut maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena sejalan dengan teori yang disampaikan Todaro dalam (Safira dkk.,2019) Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Karena pertumbuhan dan kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat dan kualitas pendidikan serta kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pendidikan memegang peranan strategis yang sangat penting dalam mendukung proses produksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai alat untuk mencapai SDGs. karena untuk mencapainya pembangunan yaitu dengan kegiatan pengembangan pendidikan, sehingga peluang peningkatan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. (Wawan, 2016).

Selanjutnya pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan mengalami Fluktuasi per tahunnya. Pada tahun 2014 pertumbuhan pengeluaran sektor kesehatan mengalami penurunan sebesar 7,37%. Lalu pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan sebesar 22,99%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 20,36% .Setelah itu, pada tahun 2017 pengeluaran sektor kesehatan mengalami penurunan sebesar -1,01%. pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 16,76%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 8,02%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar 11,93% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2015, yang dimana pada tahun yang sama kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan juga. Oleh karena itu tidak terdapat fenomena atau masalah pada tahun tersebut, akan tetapi bisa saja terdapat fenomena pada tahun setelahnya atau tahun sebelumnya. Sejalan yang dikatakan (Razmi, 2012) bahwa peningkatan pengeluaran kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan pasokan tenaga kerja dan sebagai hasilnya, meningkatkan produktivitas dan perkembangan ekonomi.

Kemudian pada pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial cenderung mengalami Flukutuasi. Yaitu tahun 2014 mengalami penurunan pertumbuhan pengeluaran sektor bantuan sosial sebesar -13,64% dibandingkan pada tahun sebelumnya, juga dimana terjadi peningkatan pada 2015 sebesar 34,15%. Lalu pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 6,80%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan

kembali sebesar -4,11%. Dan Pada tahun 2018 pertumbuhan pengeluaran bantuan sosial di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga yang tertinggi dalam 8 tahun terakhir yaitu sebesar 51,25%. Setelah itu, pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,22%. Terakhir, yaitu pada tahun 2020 cukup mengalami peningkatan sebesar 4,78% dari tahun sebelumnya. Peningkatan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya penurunan kebijakan dari pemerintah terhadap anggaran belanja bantuan sosial dan belanja pemberdayaan sosial. Kemudian pada tahun 2019 anggaran pengeluaran bantuan sosial cenderung menurun sebesar 3,22%. Hal ini membuktikan persentase masyarakat miskin penerima bantuan sosial di Indonesia mengalami penurunan drastis dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dan hanya naik sedikit di tahun 2020, ini memperlihatkan bahwa rata rata Provinsi di Indonesia tingkat kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat sudah mulai membaik dari tahun 2019 hingga 2020 yang dilihat pada grafik bahwasanya penerima bantuan sosial sudah berkurang.

Pada Grafik 1.2 menjelaskan bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial mengalami peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2018, yang dimana pada tahun yang sama kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan. Dan seharusnya pada tahun tersebut kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan juga yang dikarenakan naiknya pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial. Hal ini dapat diasumsikan bahwa seharusnya naiknya pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial tersebut maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena Searah apa yang dikemukakan Rostow di teorinya yaitu model pembangunan tentang pengeluaran

pemerintah, bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk program kesejahteraan serta kegiatan sosial tersebut bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran bantuan sosial yang dikala ini tengah dialokasikan pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Badan Pangan Non Tunai, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas serta bantuan dalam penanggulangan musibah alam. Dimana Kebijakan ini dilakukan pemerintah Indonesia selaku instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Diketahui pada Grafik 1.2 bahwa anggaran pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur mengalami fluktuasi per tahunnya. Pada tahun 2014 pertumbuhan pengeluaran sektor infrastruktur mengalami penurunan sebesar 12,55%. Lalu pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan sebesar 12,89%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,17%. Setelah itu pada tahun 2017 pertumbuhan anggaran mengalami penurunan sebesar -8,22%. pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar -3,47%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar -1,41% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,58% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan anggaran yang paling tinggi mengeluarkan pembiayaan infrastruktur terdapat pada tahun 2015 Karena Dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, anggaran infrastruktur memang dinaikkan secara besar-besaran. Pada tahun 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 290 triliun sedangkan pada tahun 2016, angkanya ditinggikan lagi menjadi Rp 313 triliun. Sebagai perbandingan, anggaran infrastruktur pemerintahan Presiden SBY rata-rata hanya Rp 150 triliun per tahunnya. Hal ini sejalan dengan yang ada

pada teori dari Dornbusch serta Fisher dalam (Manik dan Hidayat, 2010) yaitu Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur mencerminkan kebijakan pemerintah dan umumnya pengeluaran pemerintah terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam perekonomian.

Dan Pada Grafik 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur mengalami peningkatan yang terjadi pada tahun 2015, yang dimana pada tahun yang sama kualitas sumber daya manusia mengalami penurunan. Dan seharusnya pada tahun tersebut kualitas sumber daya manusia mengalami peningkatan juga yang dikarenakan naiknya pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur. kemudian pada kondisi tersebut dapat melihatkan sebuah fenomena pada tahun 2015. Hal ini dapat diasumsikan bahwa seharusnya naiknya pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur tersebut maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena menurut Ramelan dalam (Safira, 2019), Infrastruktur juga menunjukkan derajat pemerataan pembangunan. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu berkembang secara merata dan kemudian membangun infrastruktur di seluruh wilayahnya. Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, drainase, bangunan dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia di lingkup sosial dan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa masih adanya keraguan pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia yang diharapkan. Keterkaitan antara pengeluaran pemerintah yang tinggi dan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal di masing-masing provinsi di Indonesia.

Mengingat pentingnya pembangunan manusia penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang dikemukakan di atas, Maka dalam Penelitian ini permasalahan yang dapat penulis rumuskan, yaitu:

1. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia?
2. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia?
3. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia?
4. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia?
5. Sejauh mana pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar Belakang dan Rumusan masalah di atas, maka tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dan meningkatkan Ilmu serta kemampuan penulis.
2. Sebagai pertimbangan bagi pengambilan kebijakan seperti: Pemerintah Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Indonesia.
3. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Ekonomi Makro dan Ilmu Ekonomi Pembangunan untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.
4. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian permasalahan yang serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menjalin tercapainya tujuan pembangunan manusia yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan serta pemberdayaan. Prinsip yang pertama, produktivitas, mempresentasikan kebutuhan manusia untuk terus berproduksi agar proses pembangunan dapat berjalan. Prinsip yang kedua, pemerataan, menunjukkan adanya akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial bagi seluruh warga. Dua prinsip berikutnya adalah berkelanjutan dan pemberdayaan. Keberlanjutan menjadi prasyarat mutlak keseimbangan antara generasi sekarang dengan yang akan datang. Lalu prinsip terakhir, pemberdayaan, diperlukan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang juga akan menentukan arah hidup mereka sendiri. Artinya, masyarakat lebih terlibat dalam setiap keputusan dan proses-proses pembangunan, bukan hanya sekedar obyek pembangunan (UNDP, 2004).

Menurut Mankiw, (2003) istilah modal manusia biasanya mengacu pada persediaan peralatan barang dan struktur ekonomi. Namun, sebenarnya ada jenis modal lain, yang penampakan atau wujudnya tidak jelas modal

fisik, namun sama pentingnya bagi kepentingan produksi disetiap perekonomian yaitu modal manusia (*human capital*). Modal manusia adalah istilah yg sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan dan kapasitas manusia yang lain dan dapat meningkatkan produktivitas jika hal-hal tersebut ditingkatkan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hal pokok untuk mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal mendasar untuk membnetuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2009).

Investasi modal manusia memerlukan biaya dalam waktu dekat untuk menuai manfaat di masa depan. Secara umum, biaya peningkatan modal manusia dapat dibagi menjadi tiga kategori (Ehrenberg, 2017).

- a. Biaya langsung, termasuk biaya kuliah dan pengeluaran untuk buku-buku dan perlengkapan lainnya.
- b. Pendapatan yang hilang yang muncul karena selama periode investasi biasanya tidak mungkin untuk bekerja, setidaknya tidak penuh-waktu.
- c. Kerugian psikis yang terjadi karena proses pembelajaran sering sulit dan membosankan.

(Kaufman and Bruce, 2003) Menekankan bahwa modal manusia adalah Sejumlah kegiatan yang menimbulkan biaya pada periode saat ini untuk meningkatkan produktivitas di masa depan. Banyak kegiatan yang dilakukan individu dalam proses investasi meliputi: pendidikan, pelatihan, imigrasi, dan mencari pekerjaan. Jenis investasi modal manusia yang paling menjadi fokus para ekonom adalah pendidikan dan pelatihan. Selain

menjadi konsumsi yang baik bagi banyak orang (yaitu fokus manusia akan pendidikan dan pengalaman), sekolah juga dipandang oleh sebagian besar orang sebagai investasi di masa depan.

Modal manusia ialah bentuk modal tidak berwujud yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki atau diserap pekerja melalui pendidikan dan pelatihan, dan yang memberikan layanan yang berharga bagi perusahaan dari waktu ke waktu (Case & Fair, 2007). Jadi melalui pendidikan dapat menciptakan SDM yang berkualitas dalam menggunakan teknologi canggih maupun menciptakan teknologi baru sehingga produktivitas kerja meningkat, dan akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain modal fisik lebih menjadi lebih memadai jika negara atau daerah mempunyai modal manusia yang berkualitas.

Aspek pembangunan kualitas sumber daya manusia ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Manusia merupakan hal yang dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia yang memadai dalam dan untuk melakukan pembangunan kembali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara atau alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja dalam pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. Dalam Ilmu ekonomi, Indeks Pembangunan manusia (IPM) digunakan sebagai dasar penilaian kuantitatif modal manusia. Menurut (Todaro, 2009), indeks Pembangunan manusia merupakan indeks untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara yang mencakup dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Indeks Pembangunan Manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup layak (diukur dari paritas daya beli). Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

BPS (2015), mengemukakan rumus umum dalam menghitung indeks pembangunan manusia, yaitu :

$$IPM = 1/3 (X1+X2+X3)$$

Dimana : X1 = Harapan Hidup  
 X2 = Pendidikan  
 X3 = Standar Hidup Layak

Untuk mengukur kualitas manusia dapat dilihat dari capaian angka IPM. Setiap kabupaten / kota yang memiliki angka IPM yang mendekati 100 maka pembangunan manusia yang ada di daerah tersebut semakin baik, sedangkan daerah yang memiliki angka IPM yang mendekati nol maka daerah tersebut memiliki pembangunan manusia yang buruk (Kacaribu, 2013). (BPS, 2015), membedakan kategori IPM sebagai berikut :

- a) Tinggi : IPM lebih dari 80.0
- b) Menengah Atas : IPM 66.0 - 79.9
- c) Menengah Bawah : IPM antara 50.0 - 65.9
- d) Rendah : IPM kurang dari 50.0

Jadi dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia adalah teori yang menjelaskan pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas disamping modal dalam mencapai tujuan akhir dari pembangunan nasional dan bukan sebagai alat dari pembangunan. Kualitas yang dimaksud disini menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non-fisik. Kualitas sumber daya manusia teramat sangat penting dalam suatu pembangunan, hal ini dikarenakan kuantitas manusia tanpa disertai kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Faktor utama yang menentukan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Adanya modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik, sesuai yang disampaikan Mubyarto dalam (Mailendra, 2009) “*social development is economic development*” untuk menggaris bawahi proposisi bahwa investasi di bidang sosial tidak akan sia-sia dari segi ekonomi.

## **2. Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Sukirno (2006), pengeluaran pemerintah diartikan sebagai bagian dari kebijakan fiskal dimana terdapat tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) untuk

nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Sebagian dari pengeluaran pemerintah merupakan untuk mendanai administrasi pemerintahan serta sebagian yang lain merupakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan. Sebagian aspek berarti yang akan dibiayai pemerintah ialah melunasi pemasukan pegawai-pegawai pemerintah, mendanai sistem pembelajaran serta kesehatan masyarakat, mendanai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan mendanai berbagai jenis infrastruktur yang berarti artinya dalam pembangunan. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat serta mempertinggi tingkatan aktivitas ekonomi suatu negara (Sukirno, 2004).

Kemudian pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan untuk transfer payment. Transfer payment yang mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat menurut Boediono dalam (Ferry, 2012).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum (infrastruktur) yang layak yang

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. (Kemenkeu, 2004).

Adolf Wagner (1883) menyatakan bahwa “pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat”. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kesehatan, sarana dan sebagainya.

Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman (1961) menyatakan bahwa “pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut”. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Lalu Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah juga dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (1989) yang menghubungkan

pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, menengah dan lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Sedangkan tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Ferry, 2012).

### **3. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan**

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan Pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah berkewajiban menciptakan sistem pendidikan yang terpadu dan terintegrasi dengan baik kemudian terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Ketersediaan layanan pendidikan yang baik membutuhkan campur tangan pemerintah karena pendidikan merupakan barang publik. Dengan adanya pembangunan sektor pendidikan oleh pemerintah diharapkan tercipta masyarakat yang cerdas dan produktif dengan ditunjang oleh kualitas dan kuantitas sarana dan prasarannya. Meningkatnya mutu pendidikan membuat Produktifitas penduduk meningkat yang akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita di suatu

daerah dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena tarif hidupnya meningkat.

Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan, (Todaro & Smith, 2009) serta mengatakan jika pendidikan menggambarkan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan merupakan hal yang utama guna mencapai kehidupan yang memuaskan serta bernilai, sehingga merupakan hal fundamental guna menciptakan kemampuan individu yang lebih luas yang berada pada inti arti pembangunan (Safitri, 2016). Pengeluaran pemerintah sangat berhubungan dengan SDM. artinya, semakin besar peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

#### **4. Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan**

Pengeluaran Pemerintah sektor kesehatan adalah biaya yang dianggarkan pemerintah untuk tujuan pelayanan kesehatan. Biaya tersebut digunakan dalam bentuk pembelanjaan barang, belanja rutin, belanja operasional dalam rangka menciptakan program dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap masyarakat yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar. Pemerintah wajib untuk menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan membagikan pelayanan kesehatan dengan cara adil, menyeluruh, memadai, terjangkau serta bermutu.

Adapun Hukum di Indonesia yang mengurus perihal anggaran kesehatan adalah UU Nomor 36 tahun 2009 yang mengatakan bahwa besar

anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimum 5 persen dari APBN di luar pendapatan, sedangkan besar perhitungan kesehatan penguasa wilayah provinsi serta Kabupaten atau Kota dialokasikan minimum 10 persen dari APBD di luar pendapatan ( Kahang dan Saleh, 2016).

Rendahnya tingkat kesehatan mengakibatkan rendahnya produktifitas karena banyaknya hari kerja yang hilang karena sakit. Produktifitas yang rendah akan mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seorang individu. Kesehatan ialah prasyarat untuk peningkatan produktivitas, sedangkan keberhasilan Pendidikan bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh sebab itu, kesehatan bisa dilihat selaku komponen perkembangan serta pembangunan yang vital selaku input fungsi produksi agregat. Pengeluaran pemerintah pada Sektor kesehatan ialah salah satu metode pemerintah tingkatkan kesehatan warga. Dengan anggaran pengeluaran pemerintah, pemerintah bisa sediakan layanan publik baik berbentuk fasilitas serta prasarana kesehatan. Karena itu, tingkat kesehatan yang rendah sangat rentan berkaitan terhadap penurunan dari kualitas sumber daya manusia.

##### **5. Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Dalam undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial sudah diterangkan bahwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi warga dari resiko sosial yang bisa jadi berlangsung. Negara memakai Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik buat melaksanakan perihal tersebut Sehingga dengan terdapatnya realisasi bantuan sosial tersebut.

## **6. Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur**

(Kodoatie, 2003) mendeskripsikan infrastruktur selaku fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan ataupun diperlukan oleh agen-agen publik guna fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, energi listrik, pembuangan limbah, transportasi serta pelayanan-pelayanan yang lain untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Infrastruktur ialah sarana yang disediakan demi tercapai suatu pembangunan. Sarana tersebut antara lain transportasi, komunikasi, perhubungan, listrik dan lainnya. Pembangunan manusia tergantung pada ketersediaan infrastruktur dalam mendukung investasi pada sumber daya manusia yang tidak lain ialah untuk memperbaiki serta pembangunan kualitas modal manusia itu sendiri. Terdapat 3 sebab utama mengapa infrastruktur berarti dalam suatu integrasi ekonomi. pertama yaitu ketersediaan infrastruktur yang baru merupakan mesin utama pembangunan ekonomi. Kedua, Untuk Mendapatkan utilitas yang penuh dari integrasi,

ketersediaan jaringan Infrastruktur sungguh penting dalam memperlancar kegiatan perdagangan serta investasi. Ketiga ialah perhatian kepada perbaikan infrastruktur juga penting guna mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara (Friawan, 2008).

Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Setiawan, 2006). Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai pelayanan publik, agar dapat menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi atau sosial masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah pendukung yang sangat penting dalam tiap aktivitas agar berlangsung efektif dan efisien. Pembangunan akan tercapai jika didukung oleh infrastruktur yang memadai yang diindikasikan dengan kualitas layanan sarana dan prasarana yang baik (Indratno, 2008).

## **B. Hubungan Antar Variabel**

### **1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan. Menurut Putra (Saidah et al., 2017) manusia dalam perannya merupakan objek yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga sasaran pembangunan. Isu perihal sumber daya manusia( human capital) selaku input pembangunan ekonomi

sebenarnya sudah dimunculkan oleh adam smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan sesuatu negara dengan memberikan 2 aspek yakni pentingnya skala ekonomi dan pembangunan kemampuan serta kualitas manusia. Meningkatkan efisiensi masyarakat dengan metode meningkatkan investasi di sektor pendidikan, maka terdapat keseimbangan yang lebih baik antara investasi sumber daya manusia dan sumber daya fisik.

Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan mempengaruhi kepada kemajuan di sektor pendidikan yakni dengan melonjaknya jumlah pelajar yang dapat menyelesaikan sekolahnya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pemahaman serta kemampuan yang dipunyai oleh masyarakat, sehingga semakin mudah untuk setiap individu dalam umur bekerja untuk mengerti, mengaplikasikan serta memperoleh hasil dari perkembangan teknologi dan kesimpulannya meningkatkan standar ekonomi serta hidup bangsa. Suatu bangsa mesti meningkatkan investasi aspek pendidikan dan kesehatan guna menggapai tujuan tersebut (Meier, et al dalam Aimon, 2012).

## **2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Todaro & Smith, (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan

berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. sehingga dapat mendorong pembangunan manusia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Tri Maryani, (2011) menyatakan bahwa belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM, hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktifitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan, program pelayanan kesehatan. Artinya, dengan adanya program-program kesejahteraan dan pelayanan kesehatan tersebut merupakan sebagai wujud peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

### **3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial oleh Kementerian/Lembaga Nasional, Belanja Bantuan Sosial adalah tujuan Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial. serta meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat. contohnya, jaminan sosial, fasilitas pendidikan, penyediaan fasilitas bebas hambatan, penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, rehabilitasi sosial,

dll. Perwujudan bantuan sosial semacam ini dapat mengembangkan kelangsungan hidup masyarakat serta dapat meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas.

Menurut Penelitian Wahid, (2012) dengan sejalanannya fungsi pemerintah selaku kedudukan alokasi, distribusi serta stabilisasi sehingga keharusan bagi masyarakat baik di sektor pendidikan dan infrastruktur serta bantuan sosial menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Perihal itu sejalan dengan terdapatnya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah dapat diharapkan bisa melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia didaerahnya baik dari fasilitas pendidikan yang meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, dengan adanya peningkatan kualitas tersebut akan meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup serta tingkat melek huruf pada penduduk. Selain itu, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan salah satu input penting untuk mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi jangka panjang.

Oleh sebab itu, diharapkan anggaran belanja bantuan sosial dapat digunakan dengan efisien guna mewujudkan tujuan yang diharapkan yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keberhasilan kebijakan yang dilakukan pemerintah

dapat dilihat melalui sejauh mana efisiensi dari kebijakan tersebut, apakah telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan atau bahkan belum mencapai target.

#### **4. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peran infrastruktur cukup signifikan dalam mempercepat pembangunan ekonomi secara umum. Beberapa termitologi infrastruktur menjangkau hal yang lebih luas, misalnya The World Bank, (1994) memberikan batasan infrastruktur ekonomi berupa public utilities (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, jembatan, kanal, irigasi dan drainase), dan sektor transportasi (rel kereta api, terminal bus, pelabuhan dan bandar udara), infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi serta infrastruktur administrasi berupa penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi, sebagainya. Pembangunan manusia tergantung pada ketersediaan infrastruktur dalam mendukung investasi pada sumberdaya manusia yang tidak lain adalah untuk perbaikan dan juga pembangunan kualitas modal manusia itu sendiri (Safitri, 2016).

Rosyid & Lukito, (2019) Menyatakan Infrastruktur berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dan produktivitas masyarakat berarti meningkatkan perkembangan ekonomi sehingga Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki

kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, Serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Dengan adanya perbaikan pelayanan, kualitas, ataupun penambahan fasilitas infrastruktur membuat mobilitas dan kinerja masyarakat menjadi meningkat, selain itu infrastruktur yang baik akan membuka peluang para investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya untuk tujuan perluasan produksi sehingga secara tidak langsung disana terjadi penyerapan tenaga kerja.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan dalam penelitian di bawah ini:

1. Hasil penelitian Safira, Sjamsu Djohan, dan Nurjana (2019) yang berjudul "Pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi kalimantan timur" Menemukan bahwa Analisis tersebut menyatakan infrastruktur untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun, APBD untuk pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh negatif dan signifikan IPM. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan teknis analisis linier berganda kota dan kabupaten di provinsi Kalimantan timur selama periode 2004-2016.

2. Hasil penelitian Niken Sulistyowati, Bonar Marulitua Sinaga, Novindra (2017) yang berjudul "Impacts of Government and Household Expenditure on Human Development Index" Menyatakan bahwa adanya peningkatan belanja pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur mengarah pada kinerja yang lebih baik dalam peningkatan pendapatan per kapita, disposable income dan IPM dibandingkan dengan kebijakan peningkatan belanja pemerintah untuk pendidikan baik kota maupun kabupaten, tetapi kota menerima dampak terbesar dibandingkan dengan kabupaten. Penelitian ini menggunakan pooled data (data panel).
3. Hasil Penelitian Veronika Linhartová (2020) yang Berjudul "The Effect of Government Expenditure on Human Capital in the Czech Republic" membuktikan bahwa di Republik Ceko, pengeluaran untuk rekreasi, budaya, dan agama memiliki pengaruh terbesar terhadap pembangunan sumber daya manusia untuk periode yang ditinjau. Pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, yang menurut sebagian besar studi sebagai alat utama untuk mengembangkan sumber daya manusia, hanya menempati urutan ketiga atau keempat dalam hal kontribusinya terhadap pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.
4. Hasil Penelitian Fernando Montenegro dan Vijay Shenai (2019) yang berjudul "Government Expenditure, Economic Development and Economic Growth in Brazil" modal manusia - pengeluaran dalam

pendidikan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kemudian pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Brasil, kuat, dan mendukung pandangan bahwa peningkatan ukuran IPM dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hubungan negatif antara pengeluaran saat ini dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pemerintah Brasil membelanjakan di luar tingkat optimalnya untuk pengeluaran saat ini dan keputusan alokasi yang berlaku tidak berkontribusi pada pertumbuhan dalam perspektif pasar. Studi tentang pengeluaran pemerintah seperti itu belum pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ini juga menyoroti pentingnya keputusan alokasi pengeluaran pemerintah dan dengan demikian berguna bagi pembuat kebijakan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah model regresi linear berganda.

5. Hasil Penelitian Johan Beni Maharda, Bunga Zharfa Aulia (2020) yang berjudul “Government Expenditure and Human Development index Indonesia” menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah untuk pendidikan secara signifikan meningkatkan IPM, sedangkan belanja pemerintah untuk kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan IPM. Temuan utama studi ini menyoroti peran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam meningkatkan IPM

di 12 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan panel fixed effect model (FEM). analisis data pada set data tingkat provinsi dari 2010 hingga 2018.

6. Hasil penelitian Ahmad Danu Prasetyo dan Ubaidillah Zuhdi (2013) yang berjudul "The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development" Menemukan bahwa membandingkan efisiensi pengeluaran pemerintah di 81 negara selama 2006-2010 dengan menggunakan metode DEA. Dan menggunakan pengeluaran pemerintah per kapita untuk sektor pendidikan dan kesehatan serta subsidi dan transfer lainnya sebagai input dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai output.

Penelitian di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun persamaannya yaitu dalam penggunaan variabel dimana sama-sama menggunakan Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial dan Indeks pembangunan manusia sebagai indikator dari Kualitas sumber daya manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan wilayah penelitian, tahun penelitian, dan metode yang digunakan, dimana cakupan wilayah yang penulis bahas adalah antar 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Panel.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai kerangka berfikir untuk menerangkan dan menampilkan anggapan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti bersumber pada rumusan masalah yang berlandaskan kajian teori diatas. Keterkaitan variabel yang diteliti terdapatnya pengaruh antara variabel independen yang memakai variabel Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan (X1), Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan (X2), Pengeluaran Pemerintah sektor Bantuan Sosial (X3) serta Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X4) dan variabel dependen ialah Kualitas Sumber Daya Manusia (Y). Dari riset ini memandang terdapatnya pengaruh pengeluaran pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial dan Infrastruktur terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) diduga berpengaruh positif terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Y) di Indonesia. Dimana terdapatnya campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Campur tangan pemerintah dapat dilakukan dengan terdapatnya pengeluaran publik( public spending). Pengeluaran publik dilakukan dengan tujuan investasi pada sumber daya manusia dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia yang bermutu pada waktu yang akan datang. Investasi publik di aspek pendidikan ialah bagian dari pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi pada pendidikan memberikan peluang pendidikan yang lebih

merata pada masyarakat alhasil akan menaikkan sumber daya manusia yang ahli. Melonjaknya tingkat pendidikan yang digapai seseorang akan mendorong kenaikan kualitas sumber daya manusia.

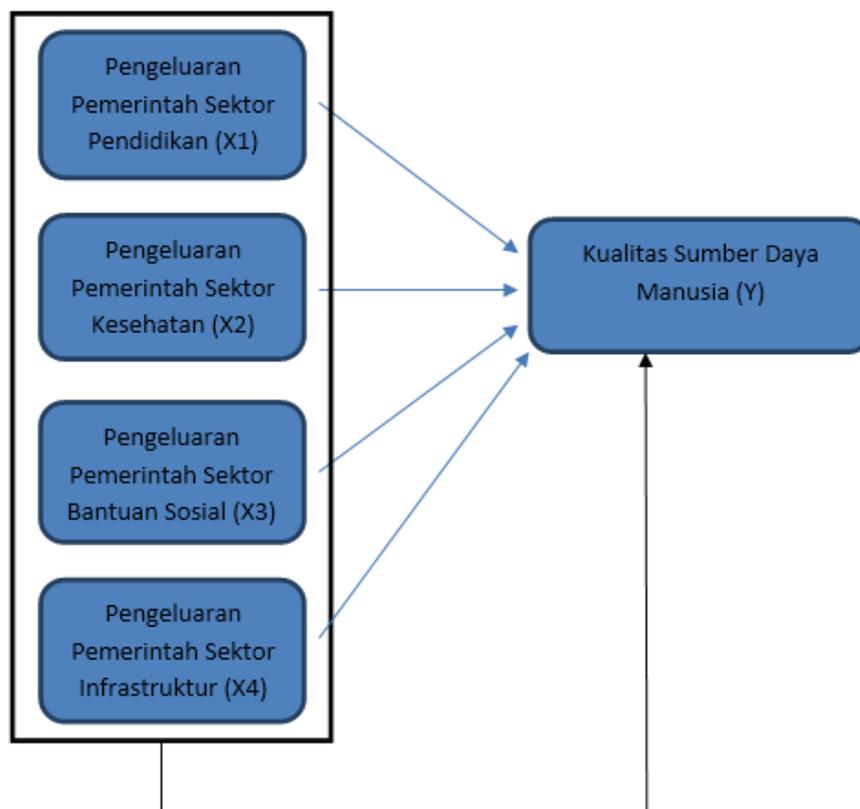
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) diduga berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia (Y) di Indonesia. Dapat dilihat dengan anggaran dana pengeluaran pemerintah seperti fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, ketersediaan air bersih dan lainnya yang diharapkan lebih menyeluruh terhadap masyarakat maka akan menambah sumber daya manusia yang berpengalaman (ahli) dan sehat jasmani.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Bantuan Sosial (X3) diduga berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia (Y) di Indonesia. Dapat dilihat dengan adanya anggaran pengeluaran pemerintah seperti dana bantuan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang meliputi pembiayaan fasilitas pendidikan, jaminan sosial, penanggulangan bencana hal tersebut akan menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam indeks pembangunan manusia dengan indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup tingkat melek huruf pada masyarakat di Indonesia.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur (X4) diduga berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia (Y) di Indonesia. Apabila segala fasilitas lengkap segala akses lancar maka produktivitas akan meningkat yang nantinya akan berimbas kepada pembangunan manusia. Karena pengeluaran Infrastruktur yang tinggi

sangat menunjang keberhasilan pembangunan dan terpenuhinya Hak-hak masyarakat. Apabila infrastruktur seperti fasilitas umum, sarana dan prasarana pendukung pembangunan ekonomi sudah baik, hal itu akan mencerminkan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas penunjang publik artinya kontribusi infrastruktur memberi pengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan pada analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini di tunjukkan pada Gambar 2.1 yaitu:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban atau anggapan yang bersifat sementara atau disebut juga dengan dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai akhirnya terbukti melalui data yang terkumpul.

maka berikut perumusan hipotesis yang digunakan berdasarkan uraian perumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Pengeluaran Pemerintah sektor Bantuan Sosial berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Pengeluaran Pemerintah sektor Infrastruktur berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial dan Infrastruktur berpengaruh terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 : \beta_4 \neq 0$$

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis Regresi Panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) dan pembahasan terhadap hasil dari penelitian antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia akan mengalami peningkatan yang signifikan.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia akan mengalami peningkatan yang signifikan.
3. Pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa ketika Pengeluaran pemerintah sektor bantuan sosial mengalami peningkatan maka kualitas sumber daya manusia akan mengalami penurunan yang signifikan.
4. Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

hal ini mengartikan bahwa ketika Pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur meningkat maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat tetapi tidak signifikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan infrastruktur terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan pengeluaran di sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi apabila alokasi sektor pendidikan ditingkatkan, maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu disarankan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan meningkatkan anggaran pendidikan agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia lebih baik lagi.
2. Peningkatan pengeluaran sektor kesehatan sudah cukup untuk meningkatkan pembangunan manusia di Indonesia. Tetapi disarankan kepada pemerintah agar dapat menambah anggaran kedepannya untuk sektor kesehatan, terutama di daerah-daerah dengan IPM yang rendah.
3. Peningkatan pengeluaran di sektor bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. untuk itu disarankan kepada pemerintah daerah untuk memperjelas transparansi

anggaran bantuan sosial agar dapat meningkatkan pembangunan manusia di tiap-tiap daerah Indonesia.

4. Peningkatan pengeluaran sektor infrastruktur belum cukup baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Perhatian pemerintah agar dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur dan mengalokasikan pengeluaran secara merata pembangunan biak sarana dan prasarana di tiap daerah.
5. Penulis mengharapkan peneliti ataupun pengembang ilmu selanjutnya dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan infrastruktur terhadap kualitas sumberdaya manusia di Indonesia karena penulis menyadari penelitian ini masih terdapat kekurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aimon, H. (2012). Produktivitas, Investasi Sumberdaya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1), 7092.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *REPUBLIK INDONESIA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2014*.
- Case & Fair. (2007). *Prinsip-prinsip ekonomi jilid 1*. Erlangga.
- CNBC Indonesia. (2020). *IPM RI Naik, Tapi Masih Kalah Sama Tetangga*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200217142358-4-138395/ipm-ri-naik-tapi-masih-kalah-sama-tetangga>
- Ehrenberg, R. G. (2017). *Modern Labor Economics 8th Edition : Theory And Public Policy*.
- Ferry, P. (2012). Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Friawan, D. (2008). *Kondisi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Keempat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indratno, I. (2008). *Indeks Pembangunan Desa sebagai Ukuran Keberhasilan Pengembangan Perdesaan*. Universitas Islam Bandung.
- Kacaribu, R. D. (2013). *Analisis indeks pembangunan manusia dan faktor-faktor yang memengaruhi di Provinsi Papua*. Departemen Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.
- Kaufman, Bruce E, and J. L. H. (2003). *The economics of labor markets*. Mason, Ohio: Thomson/South-Western.
- Kodoatie, R. J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M. (2015). *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN.
- Maharda, J. B., & Aulia, B. Z. (2020). Government Expenditure and Human Development in Indonesia. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(2), 81–94. <https://doi.org/10.37479/jej.v2i2.6901>
- Mahulauw, A., Santosa, D., & Mahardika, P. (2016). The Effect of Health and Education and Infrastructure Expenditures on the Human Development Index in Maluku Province. *Journal of Development Economics*, 14(2), 122–148.